

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
BPR HASA MITRA
TAHUN 2022**



**Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
TELEPON: (0411) 3652000**

**LEMBAR PENGESAHAN DAN
PENANDATANGANAN
LAPORAN TATA KELOLA**

Judul	Laporan Tata Kelola Tahun 2022		
Disetujui Oleh	<u>I Nyoman Supartha</u> Direktur Utama 	Date	26/1/23
	<u>I Made Semadi</u> Direktur 	Date	28/01/23
	<u>Muhammad Dahlan</u> Direktur Kepatuhan 	Date	25/01/2023
	<u>Yonggris</u> Komisaris Utama 	Date	26/1-2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
BPR Hasa Mitra Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR Hasa Mitra selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Makassar, 26 Januari 2023

BPR Hasa Mitra

Disetujui



I Nyoman Supartha
Direktur Utama

 hasamitra
bank perkreditan rakyat

Yonggris
Komisaris Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Hikmah pandemic COVID-19 banyak memberikan pembelajaran kepada setiap orang baik secara individual, masyarakat, badan/lembaga atau organisasi apapun, baik dalam berinteraksi maupun dalam hal penatakelolaan. Perubahan perilaku tersebut menjadi pilihan untuk adaptif dengan kondisi yang terjadi yang kemudian ditunjang dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) berbasis artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML) yang mampu mengakomodir kebutuhan setiap orang. Demikian halnya dunia perbankan termasuk BPR Hasa Mitra harus adaptif dan mengakselerasi dirinya dalam rangka penguatan bisnis yang dijalankan termasuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Olehnya itu, BPR Hasa Mitra harus adaptif untuk bertransformasi ke layanan berbasis digital dalam rangka memberikan kemudahan, kelancaran dan keamanan nasabah dalam bertransaksi. Termasuk model dan metode pengawasan serta koordinasi antar bagian dan kantor cabang dengan memanfaatkan sarana komunikasi secara virtual melalui zoom, meet's. Selain lebih efektif, juga lebih efisien. Demikian halnya dengan MIS yang diharapkan mampu memberikan data dan informasi kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis maupun non strategis. Akselerasi ini tentunya harus sejalan dengan prinsip Good Cooperate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

BPR Hasa Mitra menganggap bahwa dengan manajemen tata kelola perbankan yang baik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan karenanya akan semakin mengakselerasi manajemen untuk mampu mewujudkan Visi Perusahaan yakni menjadi "Bank Lokal Bereputasi Nasional yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"

Dalam penerapan konsep Manajemen Tata Kelola tersebut, BPR Hasa Mitra mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diuraikan pada POJK No. 4/POJK.03/2015

BAB I

PENJELASAN UMUM

Hikmah pandemic COVID-19 banyak memberikan pembelajaran kepada setiap orang baik secara individual, masyarakat, badan/lembaga atau organisasi apapun, baik dalam berinteraksi maupun dalam hal penatalaksanaan. Perubahan perilaku tersebut menjadi pilihan untuk adaptif dengan kondisi yang terjadi yang kemudian ditunjang dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) berbasis artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML) yang mampu mengakomodir kebutuhan setiap orang. Demikian halnya dunia perbankan termasuk BPR Hasa Mitra harus adaptif dan mengakselerasi dirinya dalam rangka penguatan bisnis yang dijalankan termasuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Olehnya itu, BPR Hasa Mitra harus adaptif untuk bertransformasi ke layanan berbasis digital dalam rangka memberikan kemudahan, kelancaran dan keamanan nasabah dalam bertransaksi. Termasuk model dan metode pengawasan serta koordinasi antar bagian dan kantor cabang dengan memanfaatkan sarana komunikasi secara virtual melalui zoom, meet's. Selain lebih efektif, juga lebih efisien. Demikian halnya dengan MIS yang diharapkan mampu memberikan data dan informasi kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis maupun non strategis. Akselerasi ini tentunya harus sejalan dengan prinsip Good Cooperate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

BPR Hasa Mitra menganggap bahwa dengan manajemen tata kelola perbankan yang baik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan karenanya akan semakin mengakselerasi manajemen untuk mampu mewujudkan Visi Perusahaan yakni menjadi "Bank Lokal Bereputasi Nasional yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"

Dalam penerapan konsep Manajemen Tata Kelola tersebut, BPR Hasa Mitra mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diuraikan pada POJK No. 4/POJK.03/2015

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Nyoman Supartha
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik.</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/ atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.</p> <p>d. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (Board Manual) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.</p> <p>e. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan.</p> <p>g. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.</p> <p>h. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.</p> <p>i. Menyusun laporan tahunan yang kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)</p>		
2.	Nama	:	I Made Semadi
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.</p> <p>b. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan</p>		

risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.

d. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan risk appetite Bank.

h. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah.

i. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan dan kewenangan dalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.

m. Menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.

o. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/ arah strategi dan kebijakan kredit, anggaran dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.

p. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.

r. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris

t. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

3.	Nama	:	Muhammad Dahlan
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.</p> <p>c. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.</p> <p>f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.</p> <p>g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p>h. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.</p> <p>i. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.</p> <p>j. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>k. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya</p>			

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Setiap rekomendasi dewan komisaris di tahun 2022 telah di tindaklanjuti dan dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan baik itu rapat pengurus maupun rapat pimpinan.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Yonggris
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
2.	Nama	:	Andi faisal Husni
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada</p>		

keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.	
e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.	
3.	Nama : Livinus Rantelino
	Jabatan : Komisaris dan Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
Rekomendasi Kepada Direksi :	
Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris telah disampaikan disetiap rapat pengurus dan/ atau rapat pimpinan serta hasil rekomendasi itu telah ditindaklanjuti oleh direksi (jika ada).	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
	b. Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat larangan

	<p>atau pembatasan.</p> <p>c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit termasuk kertas kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI.</p> <p>d. Memonitor realisasi rencana kerja audit tahunan.</p> <p>e. Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif, independen, dan memenuhi standar profesional yang berlaku.</p> <p>f. Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila diperlukan.</p> <p>g. Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang.</p> <p>h. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p>i. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.</p> <p>j. Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.</p> <p>k. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.</p> <p>l. Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BPR tepat waktu.</p> <p>m. Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan BPR atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.</p> <p>n. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik, hasil pengawasan OJK maupun regulator lainnya.</p> <p>o. Pengendalian intern dan laporan keuangan; dan Penerapan Tata Kelola.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. <p>c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko dan kebijakan lain terkait risiko yang telah disusun oleh Direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan BPR yang ditetapkan oleh Direksi dalam bidang manajemen risiko.</p> <p>d. Memberikan evaluasi terhadap tanggapan dari pemeriksa/ pengawas OJK atau regulator terhadap Dewan Komisaris terkait Manajemen risiko.</p> <p>e. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan BPR yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>f. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terkait laporan atau permintaan/usulan persetujuan atau hal-hal lain yang terkait dengan risiko yang disampaikan oleh Direksi.</p> <p>g. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko jika dibutuhkan.</p> <p>h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Evaluasi terakhir telah disampaikan pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan kepada Dewan Direksi	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1.	Komite Audit	
	Program	: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi rencana dan realisasi kerja tahunan SKAI b. Independensi SKAI dalam melaksanakan tugasnya c. Memantau bahwa SKAI menjalankan fungsi audit dengan objektif dan memenuhi standar professional yang berlaku. d. Evaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang. e. Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan Audit oleh Direksi. f. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). g. Evaluasi cakupan audit dan hal-hal yang terkait dengan audit laporan keuangan h. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standard audit yang berlaku. i. Memastikan KAP menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu. j. Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan oleh BPR atau KAP. k. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan KAP, OJK maupun regulator lainnya. l. Pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi m. Pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris n. Pemantauan kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite o. Pemantauan penanganan benturan kepentingan. p. Pemantauan penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. q. Pemantauan penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern. r. Pemantauan batas maksimum pemberian kredit s. Pemantauan realisasi Rencana Bisnis (RBB) t. Pemantauan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

	Realisasi	: <p>a. Realisasi rencana kerja tahunan SKAI semester 1 telah sesuai dengan schedule rencana kerja yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Posisi SKAI adalah dibawah supervisi langsung oleh Direktur Utama dan independen terhadap seluruh unit kerja yang ada di BPR.</p> <p>c. SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif dan masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi terutama untuk bidang pemeriksaan Teknologi dan Informasi (TI).</p> <p>d. SKAI memiliki sumber daya yang cukup namun masih dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara berkesinambungan.</p> <p>e. Masih terdapat temuan audit yang belum diselesaikan tindak lanjutnya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati.</p> <p>f. AP dan KAP yang menjadi rekanan BPR Hasa Mitra untuk audit informasi keuangan historis tahun 2021 adalah KAP Drs. Harly Weku & Prisilia dan sudah terdaftar pada OJK.</p> <p>g. KAP telah selesai melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun 2021 dengan cakupan audit sudah memadai, sesuai standard audit yang berlaku dan sudah diterima oleh auditee serta tidak terdapat tambahan cakupan audit.</p> <p>h. Direksi sudah melakukan tindak lanjut terhadap temuan KAP, OJK dan regulator lainnya.</p> <p>i. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan komisaris sudah diatur secara jelas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.</p> <p>j. BPR Hasa Mitra telah memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Komite</p> <p>k. Selama periode yang dievaluasi, tidak terdapat potensi benturan kepentingan.</p> <p>l. BPR Hasa Mitra, telah membentuk satuan kerja yang bertugas untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan satuan kerja audit intern.</p> <p>m. BPR Hasa Mitra telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk 6 risiko.</p> <p>n. BPR tidak melanggar BMPK</p> <p>o. BPR Hasa Mitra telah membuat Rencana Bisnis (RBB) dan RBB tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan operasional bank.</p> <p>p. BPR Hasa Mitra telah menerapkan</p>
--	-----------	--

			prinsip transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan secara rutin melakukan publikasi (setiap tiga bulan sekali).
	Jumlah Rapat	:	3
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Melakukan pemantauan pengendalian profil risiko
	Realisasi	:	<p>1. Risiko Kredit</p> <p>a. Dari 9 variabel untuk memantau risiko kredit, semuanya berada pada kategori low risk (rendah). Hal ini menunjukkan secara umum, tingkat risiko kredit masih tergolong berada pada posisi risiko rendah.</p> <p>b. Masalah yang dihadapi dari semua risiko kredit adalah kredit bermasalah, dimana dampaknya dapat menurunkan rentabilitas sehingga menyebabkan terganggunya likuiditas yang dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat.</p> <p>2. Risiko Operasional</p> <p>a. Dari 6 variabel untuk memantau risiko operasional, 3 Variable dalam kategori low (rendah), 3 Variable dalam kategori Moderat Risk masing2 Variable Gangguan CBS karena Internet diputus oleh Pihak Telkom (KC Pangkep), Variable Kesalahan yg ditemukan SKAI (beberapa kantor Cabang, dan Variable Kesalahan pembukuan {KC Pare2}).</p> <p>b. Risiko operasional yang rendah, sedang dan tinggi dapat menyebabkan kemampuan BPR Hasa Mitra dalam memperoleh laba akan meningkat.</p> <p>3. Risiko Kepatuhan</p> <p>a. Dari 10 variabel untuk memantau risiko kepatuhan, 5 (lima) yang masuk dalam kategori moderat (sedang) dan sisanya 5 (lima) di kategori low (rendah). Hal ini menunjukkan secara umum, tingkat risiko kepatuhan masih tergolong berada pada posisi risiko rendah.</p> <p>b. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan- aturan membantu memelihara reputasi BPR Hasa Mitra, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan.</p>
	Jumlah Rapat	:	3
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada

	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing komite telah direalisasikan dan hasilnya normatif baik.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Supartha	Rp0,00	0%
2.	I Made Semadi	Rp0,00	0%
3.	Muhammad Dahlan	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak sebagai pemegang saham pada BPR Hasa Mitra			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Supartha	-	-	0%
2.	I Made Semadi	-	-	0%
3.	Muhammad Dahlan	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Supartha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Semadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Dahlan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Supartha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Semadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Dahlan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yonggris	Rp190.749.576.000,00	93.53%
2.	Andi faisal Husni	Rp0,00	0%
3.	Livinus Rantelino	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tuan Yonggris selain merupakan komisaris utama, Yang Bersangkutan juga merupakan pemegang saham pengendali pada BPR Hasa Mitra.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yonggris	600005	PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat	70%
2.	Yonggris	-	Arogya sukha mitra	45%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham dari salah anggota dewan komisaris pada perusahaan lain tidak mempengaruhi independensi yang bersangkutan pada BPR Hasa Mitra.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yonggris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi faisal Husni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Livinus Rantelino	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi dan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yonggris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi faisal Husni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Livinus Rantelino	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi tetapi salah satu anggota komisaris yaitu komisaris utama yang juga bertindak sebagai pemegang saham pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp4.293.614.232,00	3	Rp1.899.316.094,00
2.	Tunjangan	3	Rp125.166.000,00	3	Rp25.470.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp4.418.780.232,00		Rp1.924.786.094,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pemberian gaji, tunjangan dan tantiem kepada dewan komisaris dan dewan direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (3)	Mobil (2)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang didapatkan oleh pengurus (dewan komisaris dan dewan direksi) adalah berupa mobil dinas. Adapun jika salah satu pengurus dengan pertimbangan memiliki mobil pribadi yang dapat digunakan sebagai mobil dinas, maka yang bersangkutan akan diberikan haknya berupa pengganti biaya transportasi.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.53 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	15.86 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2022	23	Evaluasi Kinerja Posisi Desember 2021 dan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2022 Bagian Bisnis
2.	19 Januari 2022	24	Evaluasi Kinerja Posisi Desember 2021 dan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2022 Bagian

			Operasional
3.	23 Februari 2022	24	Evaluasi Kinerja Posisi Januari 2022 dan Rencana Kerja Bagian Bisnis
4.	24 Februari 2022	28	Evaluasi Kinerja Posisi Januari 2022 dan Rencana Kerja Bagian Operasional
5.	10 Maret 2022	22	Evaluasi Kinerja Posisi Februari 2022 dan Rencana Kerja Bagian Bisnis
6.	26 Maret 2022	26	Evaluasi Kinerja Posisi Februari 2022 dan Rencana Kerja Bagian Operasional
7.	18 April 2022	22	Evaluasi Kinerja Posisi Triwulan I Tahun 2022 dan Rencana Kerja Bagian Bisnis
8.	25 April 2022	26	Evaluasi Kinerja Posisi Triwulan I Tahun 2022 dan Rencana Kerja Bagian Operasional
9.	18 Mei 2022	22	Evaluasi Kinerja Posisi Bulan April 2022 dan Rencana Kerja Bagian Bisnis
10.	24 Mei 2022	27	Evaluasi Kinerja Bulan April 2022 dan Rencana Kerja Bagian Operasional
11.	07 Juni 2022	27	Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2022 dan Rencana Kerja Bagian Operasional
12.	15 Juni 2022	22	Evaluasi Kinerja Posisi Bulan Mei 2022 dan Rencana Kerja Bagian Bisnis
13.	07 Juli 2022	27	Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2022 Bagian Operasional
14.	20 Juli 2022	24	Evaluasi Kinerja Semester I Bagian Bisnis
15.	09 Agustus 2022	29	Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2022 Bagian Operasional
16.	26 Agustus 2022	20	Evaluasi Kinerja Juli 2022 Bagian Bisnis
17.	26 September 2022	23	Evaluasi Kinerja Agustus 2022 Bagian Bisnis
18.	27 September 2022	23	Evaluasi Kinerja Agustus 2022 Bagian Operasional
19.	07 Oktober 2022	22	Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja Triwulan Tahun 2022 Bagian Bisnis
20.	13 Oktober 2022	26	Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja Triwulan Tahun 2022 Bagian Operasional
21.	07 November 2022	35	1. Evaluasi Kinerja Tahun 2022 2. Pembahasan Strategi Bisnis dan Penetapan Target Tahun 2023
22.	18 November 2022	36	Penetapan Target Tahun 2023
23.	16 April 2022	7	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022
24.	16 Juni 2022	7	1. Rencana Kerjasama Kredit Sindikasi dengan Esta Dana Ventura 2. Rencana Kerjasama Dengan Koperasi Jasa Purna Karya Abadi 3. Lain-lainnya
25.	12 Oktober 2022	7	1. EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TH 2022 DAN RENCANA STRATEGI BISNIS 2. PERSIAPAN HUT DAN RAKER 2022
26.	20 April 2022	4	Evaluasi Kinerja Triwulan 1

27.	06 Juli 2022	4	Evaluasi Kinerja Triwulan 2
28.	09 November 2022	4	1. Pengawasan Dewan Komisaris 2. Penyelamatan Kredit Bermasalah Koperasi Karyawan PT EPFM
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<p>Rapat Pimpinan merupakan forum Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja bulanan dengan agenda rapat secara umum adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan laporan dan mengevaluasi kinerja di masing-masing bagian dan kantor, • Mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Hasa Mitra, • Membahas issue-issue strategis yang perlu disikapi untuk kelancaran usaha perseroan, • Dan hal lainnya yang dianggap perlu ; seperti kegiatan CSR, partisipasi kegiatan dll. <p>Proses pengambilan keputusan selalu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat</p>			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Yonggris	18	0	72%
2.	Andi faisal Husni	26	0	92.86%
3.	Livinus Rantelino	27	0	96.43%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
<p>Pelaksanaan Rapat Pimpinan terlaksana 2 (dua) kali setiap bulannya dengan agenda pembahasan masing-masing terkait bisnis dan operasional BPR Hasa Mitra. Secara umum pelaksanaan Rapat Pimpinan dilaksanakan secara daring via virtual zoom, terkecuali rapat evaluasi di bulan Oktober 2022 dan Pra Raker dan Raker dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2023 dilaksanakan secara tatap muka. Setiap pelaksanaan Rapat Pimpinan selalu dihadiri oleh Dewan Komisaris</p>				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Merujuk pada hasil pemeriksaan SKAI BPR Hasa Mitra dalam kurung waktu tahun 2022 dimana ditemukan adanya penyimpangan/ kecurangan/ dengan praktek meminta atau menerima fee setelah realisasi pencairan kredit untuk keuntungan pribadi dan dana hasil pencairan dipindahbukuan/ ditransfer ke pihak lain serta pengajuan digunakan atas nama orang lain yang dilakukan oleh Pegawai yang berdampak pada reputasi dan permasalahan hukum								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2022, BPR Hasa Mitra juga tidak diperhadapkan dengan permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata. Kasus yang saat masih berjalan adalah proses keberatan atas sanksi pajak karena adanya perbedaan penafsiran perlakuan pembebanan pajak serta adanya somasi dari debitur terkait hilangnya Ijasah Debitur.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Yonggris	Pemilik & Komisaris Utama	I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor BPR Hasa Mitra	4.500 juta rupiah	Pengambil keputusan dilakukan oleh ketiga direksi yaitu I Nyoman Supartha, I Made Semadi dan Muhammad Dahlan. Dasar pertimbangan yaitu Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Saat ini semua gedung kantor yang ditempati BPR Hasa Mitra berstatus sewa kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) sekaligus sebagai Komisaris Utama. Meskipun demikian Direksi tetap mengacu pada Kebijakan Internal BPR yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Sebelum penetapan sewa, Direksi melalui bagian umum telah melakukan survei harga sebagai pembandingan atas nilai sewa dengan memperhatikan posisi gedung terhadap akses (letak strategis), luas parkir dan kualifikasi bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas.

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah umum lainnya

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 Maret 2022	Sosial	Pemberian Sembako ke panti asuhan bersama	Pantia Asuhan	Rp1.166.600,00

			Armed		
2.	21 Maret 2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid	SMPN 23 Makassar	Rp2.000.000,00
3.	07 April 2022	Sosial	Pembagian Takjil Depan Polres pelabuhan	Masyarakat	Rp3.135.125,00
4.	14 April 2022	Sosial	Pembagian Takjil Depan Detasemen A Brimobda Sulsel	Masyarakat	Rp3.135.125,00
5.	21 April 2022	Sosial	Pembagian Takjil Depan Vihara Ibu Agung Bahari	Masyarakat	Rp3.135.125,00
6.	28 April 2022	Sosial	Pembagian Takjil Depan Hasamitra Kantor Pusat	Masyarakat	Rp3.135.125,00
7.	04 November 2022	Sosial	Penanaman Pohon di Arhanud 16/ SBC/3 KOSTRAD	Masyarakat	Rp9.260.200,00
8.	12 November 2022	Sosial	Donor Darah dan MCU Gratis Hasamitra Kantor Pusat	Masyarakat	Rp15.109.900,00
9.	17 Desember 2022	Sosial	Bakti sosial dan penyerahan bantuan	Gereja Toraja Mamasa Bonto Bunga Kab. Maros	Rp5.566.500,00
10.	20 Desember 2022	Sosial	Anjongsana RS Pelamonia, RS Faisal, RS Siloam, RS Stella Maris	Pasien	Rp6.000.000,00
11.	07 April 2022	Sosial	Bagi Takjil Depan kantor kodim gowa, Di Mesjid Agung Syech Yusuf, Depan kantor Hasamitra Gowa	Masyarakat	Rp5.600.000,00
12.	19 April 2022	Sosial	Anjongsana Ke RS Syech Yusuf dan Panti Asuhan Yuda Mandiri dan reski Ananda	masyarakat	Rp4.592.000,00
13.	20 April 2022	Sosial	Paket Lebaran kepada petugas kebersihan	Petugas Kebersihan	Rp16.458.000,00
14.	08 April 2022	Sosial	Buka Puasa bersama bendahara instansi dan pembagian paket bendahara	Bendahara Instansi	Rp34.489.985,00
15.	21 Desember	Sosial	Kegiatan Baksos	masyarakat	Rp5.955.000,00

	2022		penyerahan bantuan stunting kepada masyarakat Gowa	Gowa	
16.	13 Januari 2022	Sosial	SUMBANGAN LAMPU SOROT	BRIMOB DEN C	Rp175.000,00
17.	19 Mei 2022	Sosial	DUKUNGAN BINGKISAN LEBARAN	KOREM 141 TODDOPULI	Rp3.000.000,00
18.	21 Mei 2022	Sosial	ANJANGSANA RS. M. YASIN	Masyarakat	Rp3.310.000,00
19.	21 Mei 2022	Sosial	BAKSOS/BAKTI KEBERSIHAN MESJID SONGKOK RECCA, MESJID AL-IHLAL, MESJID RAYA	KEBERSIHAN MESJID SONGKOK RECCA, MESJID AL-IHLAL, MESJID RAYA	Rp620.000,00
20.	21 Mei 2022	Sosial	BUKA PUASA PETUGAS KEBERSIHAN	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp12.400.000,00
21.	21 Mei 2022	Sosial	BAKSOS PANTI ASUHAN AL HIDAYAH	PANTI ASUHAN AL HIDAYAH	Rp1.500.000,00
22.	21 Mei 2022	Sosial	PASAR MURAH DI LAPANGAN MERDEKA	MASYARAKAT	Rp774.000,00
23.	21 Mei 2022	Sosial	BUKA PUASA BERSAMA DI MESJID SONGKOK RECCA	MASYARAKAT	Rp2.000.000,00
24.	21 Mei 2022	Sosial	BAGI TAKJIL BERSAMA BHAYANGKARI	MASYARAKAT	Rp1.650.000,00
25.	15 Juni 2022	Sosial	KEGIATAN WAISAK VIHARA DHARMA PALAKKA	VIHARA DHARMA PALAKKA	Rp1.000.000,00
26.	21 Juni 2022	Sosial	MTQ STADION LAPATAU	MASYAKARAT	Rp1.000.000,00
27.	20 Juli 2022	Sosial	MEDICAL CHECKUP KANTOR KEJAKSAAN	MASYARAKAT	Rp4.200.000,00
28.	03 November 2022	Sosial	SUNATAN MASSAL DINAS KESEHATAN	MASYARAKAT	Rp1.500.000,00
29.	09 April 2022	Sosial	BAKTI SOSIAL RAMADHAN	MASJID TELKOMAS	Rp492.000,00
30.	22 April 2022	Sosial	BUKA PUASA BERSAMA	Panti Asuhan Al. Muhtadina & Panti Asuhan Nur	Rp1.845.000,00
31.	22 April 2022	Sosial	BAGI SEMBAKO	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp5.999.200,00

32.	17 Mei 2022	Sosial	CSR KANTOR WING II PASKHAS	Mako Wing 2 Paskhas	Rp1.000.000,00
33.	20 Mei 2022	Sosial	BAGI TAKJIL RAMADHAN	MASYARAKAT	Rp4.200.000,00
34.	04 Agustus 2022	Sosial	JUMAT BERKAH KODIM 1423 MAROS	Mako KODIM 1422 Maros - Jl. Dr. Ratulangi, Maros	Rp500.000,00
35.	23 September 2022	Sosial	JUMAT BERKAH WING II PASKHAS	Mako Wing 2 Paskhas - Jl. Poros Bandara	Rp500.000,00
36.	28 September 2022	Sosial	CSR KANTOR KRIMSUS POLDA	KRIMSUS POLDA	Rp3.450.000,00
37.	10 April 2022	Sosial	Bantuan Sembako untuk petugas kebersihan	MASYARAKAT	Rp9.377.500,00
38.	23 April 2022	Sosial	Bantuan Sembako ke Panti Asuhan	Panti Asuhan Ar-Rahman, Kota Palopo	Rp1.458.000,00
39.	09 April 2022	Sosial	Bakti Sosial Di Masjid	MASJID PALOPO	Rp240.000,00
40.	07 April 2022	Sosial	Anjongsana ke Rumah Sakit	PASIEN	Rp849.000,00
41.	07 April 2022	Sosial	Berbagi Takjil Buka Puasa	MASYARAKAT	Rp6.065.500,00
42.	22 Maret 2022	Sosial	Sumbangan Kegiatan CHENG BENG	CHENG BENG	Rp1.000.000,00
43.	19 April 2022	Sosial	Bantuan Pengadaan Pintu CARD SENSOR POLRES LUWU	Polres Luwu	Rp3.000.000,00
44.	13 Juni 2022	Sosial	bantuan Printer Epson L3210 Utk Sumbangan ke KODIM Palopo	KODIM Palopo	Rp2.300.000,00
45.	30 September 2022	Sosial	Sumbangan Pembelian Proyektor untuk KODIM	KODIM Palopo	Rp4.730.000,00
46.	29 Oktober 2022	Sosial	Sumbangan Umbul-umbul Kegiatan Brimob Baebunta	Brimob Baebunta	Rp6.720.000,00
47.	11 November 2022	Sosial	Sumbangan Kegiatan Yonif 721 (Serpas Personel dalam rangka Satgas)	Yonif 721	Rp300.000,00
48.	19 November 2022	Sosial	MCU & Donor Darah, Penanaman Pohon	MASYAKARAT	Rp5.075.000,00

49.	21 November 2022	Sosial	MEDICAL CHECK UP & DONOR DARAH	MASYARAKAT	Rp445.500,00
50.	08 April 2022	Sosial	Bagi Ta'Jil serta Anjongsana Rumah sakit	MASYARAKAT	Rp5.941.200,00
51.	09 April 2022	Sosial	Paket Sembako ke Petugas Kebersihan (buka puasa bersama)	Petugas Kebersihan	Rp5.228.300,00
52.	21 April 2022	Sosial	BAKTI SOSIAL	pesantren almunawwarah di bawah naungan kementerian Agama parepare	Rp2.128.600,00
53.	05 Mei 2022	Sosial	Penghijauan kerjasama DLH, BRIMOB,KODIM,FKH	Institut Agama Islam Negeri Parepare	Rp1.500.000,00
54.	04 Juli 2022	Sosial	Buka Puasa Bersama dan Pembagian Paket bendahara	BENDAHARA INSTANSI	Rp6.635.300,00
55.	30 Oktober 2022	Sosial	Donor Darah & Medhical Check up	MASYARAKAT	Rp4.400.000,00
56.	17 Desember 2022	Sosial	Pembersihan Gereja dan Anjongsana Rumah sakit natal	Gpdl Gereja Jemaat Bukit Zaitun Parepare , RSUD Andi Makkasau	Rp2.245.700,00
57.	08 April 2022	Sosial	baksos panti asuhan	PANTIASUHAN MUHADAYA MAWADDAH	Rp1.465.000,00
58.	08 April 2022	Sosial	anjongsana dan pemberian paket sembako ke kaum dhuafa	MASYARAKAT	Rp7.752.400,00
59.	07 April 2022	Sosial	BAGI TAKJIL	MASYARAKAT	Rp3.545.000,00
60.	09 April 2022	Sosial	BAKTI SOSIAL KE MESJID	MESJID RAODATUL JANNAH LAIKANG	Rp975.000,00
61.	05 November 2022	Sosial	PENANAMAN POHON POLITANI PANGKEP	MASYARAKAT	Rp1.584.000,00
62.	12 November 2022	Sosial	medical chek up	masyarakat	Rp6.534.900,00
63.	17 Desember 2022	Sosial	bakti sosial gereja kristen SUL-SEL jemaat Pangkep	GEREJA KRISTEN SUL-SEL JEMAAT PKP	Rp551.000,00

64.	14 Maret 2022	Sosial	KEGIATAN VAKSINASI POLRES MAMASA	MASYARAKAT	Rp1.800.000,00
65.	21 Mei 2022	Sosial	PEMBAGIAN PAKET SEMBAKO KE PETUGAS KEBERSIHAN	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp8.551.500,00
66.	06 Juni 2022	Sosial	PERBAIKAN TAMAN POLRES POLMAN	POLRES POLMAN	Rp2.000.000,00
67.	13 Juni 2022	Sosial	BANTUAN 1 UNIT LAPTOP DAN PRINTER UNTUK POLRES MAMASA	POLRES MAMASA	Rp1.884.700,00
68.	14 Juni 2022	Sosial	PEMBAGIAN PAKET SEMBAKO BERSAMA KODIM ENREKANG	KODIM ENREKANG	Rp1.875.700,00
69.	11 Maret 2022	Sosial	SELEKSI TILAWATULQURAN PEMKAB SIDRAP	PEMKAB SIDRAP	Rp500.000,00
70.	15 November 2022	Sosial	PENANAMAN POHON, MEDICAL CHECK UP	MASYARAKAT	Rp4.018.000,00
71.	26 Desember 2022	Sosial	GERAKAN PRABUKA KAB SIDRAP	MASYARAKAT	Rp50.000,00
72.	21 Februari 2022	Sosial	BANTUAN GERAKAN PILAH SAMPAH BERSAMA INSTANSI diNAS LINGKUNGAN HIDUP	MASYARAKAT	Rp500.000,00
73.	04 April 2022	Sosial	SUMBANGAN KE TAMAN CALLACCU BERUPA PEMBUATAN WC PORTABLE	MASYARAKAT	Rp500.000,00
74.	16 April 2022	Sosial	PEMBAGIAN SEMBAKO KE PETUGAS KEBERSIHAN	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp2.720.000,00
75.	07 April 2022	Sosial	BAGI TA'JIL	MASYARAKAT	Rp1.400.000,00
76.	12 April 2022	Sosial	ANJANGSANA KE RUMAH SAKIT	PASIEN	Rp2.299.700,00
77.	08 April 2022	Sosial	PEMBERSIHAN MESJID DAN PEMBERIAN PAKET KE PANTI ASUHAN	MESJID AMSSANGENG DAN PANTI ASUHAN DARRUSSALAM	Rp2.821.500,00
78.	14 April 2022	Sosial	BAGI SEMBAKO BERSAMA KEC	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp1.000.000,00

			TEMPE		
79.	05 November 2022	Sosial	KEGIATAN PENANAMAN POHON BERSAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KODIM	MASYARAKAT	Rp1.992.500,00
80.	12 November 2022	Sosial	MEDICAL CHECK UP SERTA DONOR DARAH	MASYARAKAT	Rp7.877.000,00
81.	07 April 2022	Sosial	Bagi Ta'Jil/ Anjongsana Rumah sakit	PASIEN	Rp8.000.000,00
82.	18 April 2022	Sosial	Paket Sembako ke Petugas Kebersihan	Petugas Kebersihan	Rp2.500.000,00
83.	09 April 2022	Sosial	BAKTI SOSIAL DI BULAN RAMADHAN	Masjid Mauzahan. Nasrullah, Nurul Hidayah, Masjid Nurul Akbar dan Panti asuhan Darul Ijtihad	Rp1.200.000,00
84.	05 November 2022	Sosial	Penanaman pohon	MASYARAKAT	Rp1.350.000,00
85.	11 April 2022	Sosial	Buka Puasa Bersama bendahara dan Pembagian Paket bendahara	BENDAHARA INSTANSI	Rp8.300.000,00
86.	12 November 2022	Sosial	Donor Darah Dan Medical Check up	MASYARAKAT	Rp12.050.000,00
87.	17 Desember 2022	Sosial	Baksos/Anjongsana Kegiatan Natal 2022	Gereja Toraja Klasis Jemaat makassar dan RSUD Sultan Dg Rdja Bulukumba	Rp2.750.500,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Sesuai dengan Misi Perusahaan yang "Social Business Enterprise", BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2022, Manajemen telah menetapkan budget anggaran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atas usulan dari masing-masing kantor cabang, namun tidak untuk kegiatan yang bermuatan politik.

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: BPR Hasa Mitra
Alamat	: Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
Nomor Telepon	: (0411) 3652000
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp369.013.498.294,00
Total Aset	: Rp2.635.362.773.309,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR Hasa Mitra Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.31	0.262
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.10	0.138
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1.50	0.038
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.67	0.167
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.40	0.140
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.45	0.145
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.27	0.095
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.50	0.113
Nilai Komposit			1.400
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.31)

Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi :

1. Struktur dan Infrastruktur Direksi BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terlaksana berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Sistem kordinasi Board Of Director (BOD) berjalan dengan baik. Peningkatan kompetensi Direksi dengan mengikuti berbagai seminar baik luring maupun daring, proaktif dalam aktifitas yang digagas oleh regulator dalam hal ini OJK, BI, LPS, Dirjen Pajak dan lembaga terkait, serta event lainnya yang terkait dengan kompetensi dan profesionalisme perbankan.
3. Laporan Hasil Tata Kelola BPR Hasa Mitra disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham sebagai pertanggungjawaban, OJK, Assosiasi BPR dalam hal ini DPP Perbarindo dan juga dipublish melalui Media BPR sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.1)

Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris berikut keberadaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam menunjang tugas dan fungsi Komisaris telah dipenuhi menunjuk standar POJK Tata Kelola BPR.
2. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR dan penyelesaian komitmen-komitmen kepada pihak OJK atau pihak eksternal lainnya.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (tidak termasuk yang dikecualikan) merujuk pada Pedoman Tata Tertib Kerja Pengurus BPR Hasa Mitra.
4. Intensitas kehadiran dan komunikasi Komisaris sangat baik. Kehadiran Komisaris berkantor selama 5 hari kerja dalam sepekan.
5. Komisaris menempati 1 (satu) ruang yang sama sehingga komunikasi dan diskusi terkait perkembangan BPR Hasa Mitra relative lebih intens.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 1.5)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko,
2. Komite tersebut telah menjalankan tugas tanggung jawabnya melakukan evaluasi penerapan fungsi audit dan penerapan fungsi manajemen risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen.
3. Evaluasi terakhir telah disampaikan pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan kepada Dewan Direksi

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Benturan Kepentingan:

1. BPR telah memiliki Pedoman Kode Etik PT BPR Hasa Mitra yang salah satu muatannya mengatur tentang kebijakan benturan kepentingan.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi selalu mendudukkan secara professional berdasar pada ketentuan internal dan eksternal yang telah mengatur..

3. Hingga saat ini semua transaksi dengan pihak terkait masih berjalan normatif dan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.67)

Penerapan Fungsi Kepatuhan:

1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Direktur Kepatuhan berikut Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan.
2. Dalam rangka optimalisasi fungsi, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah merumuskan program kerja tahunan sebagai target kerja untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan serta memastikan BPR dalam gerak operasionalnya telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk memastikan terpenuhinya komitmen dengan pihak eksternal, mereview dan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dengan aturan-aturan yang berlaku.
3. Tugas dan tanggung jawab serta realisasi program kerja periode tahun 2022 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.4)

Penerapan Fungsi Audit Intern

1. BPR Hasa Mitra memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. SKAI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman kerja yang mencakup seluruh aspek unsur kegiatan bank. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
3. SKAI telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Direktur Utama dan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu.
4. Kaji Ulang pihak eksternal terhadap penerapan fungsi audit intern pertama kalinya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 yang dilakukan oleh KAP Indarto Waluyo dan telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 10/ SKAI/ KAP- IW/ BPRHm/ HS/ III/2020 oleh Akuntan Publik Indarto Waluyo, M.Acc,Ak, CPA, CA, CPI NRAP: AP.0906 tertanggal 24 Maret 2020 dan akan dikaji ulang kembali tahun 2023 nanti.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. BPR Hasa Mitra menugaskan Kantor Akuntan Publik Drs. Harley Weku and Priscillia sebagai KAP yang terdaftar dalam list KAP yang direkomendasikan oleh OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan BPR Hasa Mitra Tahun buku 2021.
2. Kerja sama tersebut didukung oleh aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesionalisme akuntan publik.
3. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Drs. Harley Weku and Priscillia telah memenuhi cakupan ruang lingkup serta memberikan penggambaran kondisi keuangan BPR Hasa Mitra. KAP telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 00009/3.0234/ AU.2/07/0351.2/1/ IV/2020 dengan opini laporan keuangan 31 Desember 2021 telah disajikan secara wajar. Laporan tersebut telah disampaikan ke OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.45)

Penerapan Manajemen Risiko

1. BPR Hasa Mitra telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pedoman dan Kebijakan yang

disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Komisaris.

2. Direksi telah menetapkan kebijakan perihal tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra sebagai salah satu bentuk pengendalian internal bank.
3. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya secara otomatis oleh Core Banking System (CBS).
4. Sebagai BPR dengan modal inti diatas Rp 50 miliar, BPR telah menerapkan manajemen risiko atas 6 (enam) profil risiko. Untuk mendukung penerapan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko aktif melakukan Kampanye Budaya Patuh dan Kampanye Sadar Risiko baik melalui sosialisasi saat briefing pagi, lefleat ke grup-grup media sosial tertutup lingkup BPR Hasa Mitra.
5. BPR menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Laporan Produk dan Aktifitas baru yang dilakukan oleh BPR

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Hasa Mitra telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Hasa Mitra mengacu pada ketentuan yang di atur oleh POJK.
2. Hingga saat ini tidak terdapat fasilitas yang melampaui BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.27)

Rencana Bisnis BPR

1. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, semua Pejabat Eksekutif, dan Pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra dengan agenda evaluasi kinerja keuangan tahun 2022 dan penetapan target bisnis BPR tahun 2023. Bagian dari agenda dimaksud mencakup rencana strategis untuk mendukung pencapaian target bisnis, rencana strategis dalam rangka pengembangan jangka menengah dan jangka panjang. Semua keputusan yang dihasilkan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan analisis SWOT (memperhatikan faktor internal dan eksternal bank), trend data histori dengan memperhatikan aspek kesehatan bank dan manajemen risiko.
3. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
4. Dewan Komisaris proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan evaluasi dan saran terkait pelaksanaan Rencana Bisnis BPR sepanjang tahun 2022

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal

1. BPR menyusun Laporan Keuangan Publikasi per Triwulan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diumumkan melalui media pengumuman di Kantor BPR Hasa Mitra, website BPR Hasa Mitra serta media massa lokal. Laporan publikasi tersebut dilaporkan juga ke OJK.
2. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik berupa brosur, lefleat, media social (Instagram, facebook, website) dan media massa termasuk informasi layanan call center atau disampaikan langsung oleh Customer Service BPR Hasa Mitra.
3. BPR Hasa Mitra dilengkapi Mitracall 24/7 sebagai sarana layanan pengaduan nasabah yang bertugas 24 jam selama sepekan penuh. Penyelesaian aduan nasabah merujuk pada kebijakan Pengaduan Nasabah dengan Standars Level Aggrement (SLA) yang terukur berdasarkan ketentuan OJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian GCG (Self Aessment) pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2022 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.4 (satu point empat) predikat sangat baik.
Terlampir hasil penilaian Self Assessment yang kami lakukan.
Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih baik lagi.

Makassar, 26 Januari 2023

BPR Hasa Mitra

Disetujui

I Nyoman Supartha
Direktur Utama

Yonggris
Komisaris Utama

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian GCG (Self Aessment) pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2022 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.4 (satu point empat) predikat sangat baik.
Terlampir hasil penilaian Self Assessment yang kami lakukan.
Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih baik lagi.

Makassar, 26 Januari 2023

BPR Hasa Mitra

Disetujui


I Nyoman Supartha
Direktur Utama hasamitra
bank perkreditan rakyat
Yonngaris
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Hasa Mitra

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506157-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-602070-28012023085336

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

dessi@hasamitra.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-28 08:53:36



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.